

KORIDOR Co-Working Space sebagai Perwujudan Government Economic Responsibility Pemerintah Kota Surabaya

by Dedi Setyawan

Submission date: 23-Apr-2020 11:29AM (UTC+1000)

Submission ID: 1274699805

File name: LAmbung_Mangkurat.pdf (432.39K)

Word count: 3368

Character count: 22562

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/328461821>

KORIDOR Co-Working Space sebagai Perwujudan Government Economic Responsibility Pemerintah Kota Surabaya

Chapter · October 2018

CITATIONS
0

READS
83

3 authors, including:



Siska Armawati Sufa
University Dr. Soetomo
15 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Slamet Riyadi
University Dr. Soetomo
10 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Corporate Culture [View project](#)



Marketing Strategic [View project](#)

KORIDOR

Co-Working Space sebagai Perwujudan Government Economic Responsibility Pemerintah Kota Surabaya

Siska Armawati Sufa, Slamet Riyadi, Budiyo
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
e-mail: siska.armawati@unitomo.ac.id
Mobile Phone: 085259769444

Abstract. The Surabaya City Government wants to try to develop Surabaya as a digital start-up center like Silicon Valley in the United States (Wardani, 2017). Surabaya itself has several co-working spaces, including Sub-Co, Revio Space, Satu Atap, KORIDOR, and many more. KORIDOR is the only co-working space established by the Surabaya City Government, as part of the vision of the mayor of Surabaya, Tri Rismaharini, to make Surabaya a creative and technological center at the global level. KORIDOR is the first step to building and strengthening the foundations of creative economy at the local level. One of the objectives of the establishment of KORIDOR is as a manifestation of the government economic responsibility of the Surabaya City Government in creating an ecosystem to empower creators, innovators, and local entrepreneurs to create innovation and be able to compete at the global level. This study describes smart city, especially regarding the efforts of the Surabaya City Government to provide a forum for prospective entrepreneurs and start-up founders to embody government economic responsibility. This research uses a qualitative approach with the findings of data from interviews.

The results conclude the Surabaya city government believes in the talents and potential of its citizens by devoting a large portion of tax revenues to investing in the economic growth of its citizens to achieve their potential as an economic responsibility in the form of public facilities that benefit the community by establish KORIDOR as a co-working space for Surabaya residents to use in producing valued real-work for development. In addition, the government image will be well maintained so that government activities in the long term will be considered as a positive contribution to the community with the hope that the government will get positive feedback from the community every time they make a new policy.

Kata kunci: *co-working space, government economic responsibility, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab ekonomi pemerintah, pemerintah kota Surabaya*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan ilmu teknologi informasi telah memicu pertumbuhan peluang *entrepreneur* di Indonesia semakin meningkat, dengan demikian memicu pula pertumbuhan *start-up* di Indonesia yang semakin mengalami peningkatan. Sehingga, sebuah tren baru tempat kerja bersama alias ruang bersama kekinian yang disebut *co-working space* semakin menjamur dan dikenal oleh banyak orang.

Industri *co-working space* di Asia Tenggara tumbuh sekitar lima belas persen pada 2017 lalu. Peluang di Indonesia sendiri menurut penggiat industri masih besar, baik di kota-kota besar ataupun di daerah sekitarnya. Sektor UKM Indonesia yang terus tumbuh

merupakan salah satu peluang, di mana pengelola *co-working space* dapat memenuhi kebutuhan sejumlah wirausahawan yang membutuhkan tempat kerja fleksibel. Edukasi masyarakat masih diperlukan guna mengubah pola pikir *co-working space* sebagai sekadar tempat kerja, menjadi tempat berkolaborasi, bertukar pikiran, dan mendapatkan akses ke beragam kesempatan (Universitas Al Azhar Indonesia, 2018).

Desain *co-working space* yang mengusung konsep *open space* atau *transparancy*, membuat setiap individu di dalam *co-working space* dapat lebih aktif berinteraksi. Sebuah *co-working space* biasanya memiliki suasana yang mendukung semangat dan produktifitas kerja. Terutama bagi *founder start-up* baru, pastinya membutuhkan tempat yang tepat untuk berkordinasi bersama tim yang biasanya beranggotakan masih sedikit (Ev Hive, 2017). Pengertian *co-working space* (ruang kerja bersama) adalah sebuah tempat dimana para individu-individu yang memiliki latar belakang pekerjaan ataupun bisnis yang sama bekerja dalam sebuah tempat. Asal dari definisi *co-working space* itu sendiri adalah berasal dari kata '*co-working*' yang bisa diartikan kerja sama atau berkolaborasi.

Co-working space tidak hanya untuk para *start-up founder*, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk seseorang yang memiliki bisnis *digital* secara individu hingga para *freelancer* profesional yang membutuhkan tempat untuk bekerja di luar rumah namun dengan suasana tidak seperti berada di kantor sehingga lebih nyaman dan tidak terlalu formal.

Co-working space di Indonesia pertama kali hadir di Kota Bandung sekitar tahun 2010. Kota Bandung dikenal sebagai pelopor lahirnya berbagai inovasi yang unik dan menarik. Setelahnya, ruang kerja berkonsep *sharing* ini menjamur di berbagai kota besar Indonesia lainnya. *Co-working space* pun berhasil menarik perhatian bagi para *founder start-up* hingga *freelancer*.

Pemerintah Kota Surabaya, ingin berupaya mengembangkan Surabaya sebagai pusat *start-up digital* layaknya Silicon Valley di Amerika Serikat (Wardani, 2017). Surabaya sendiri memiliki beberapa *co-working space*, diantaranya adalah: Sub-Co, Revio Space, Satu Atap, KORIDOR, dan masih banyak lagi. KORIDOR adalah satu-satunya *co-working space* yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bagian dari visi walikota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk menjadikan Surabaya sebagai sentra kreatif dan teknologi di tingkat global. KORIDOR merupakan langkah awal untuk membangun dan memperkuat pondasi ekonomi kreatif di tingkat lokal. Salah satu tujuan dibentuknya KORIDOR adalah sebagai salah satu wujud dari *government economic responsibility* Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan ekosistem guna memberdayakan para kreator, inovator, dan *entrepreneur* lokal untuk menciptakan inovasi dan mampu bersaing di tingkat global.

Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*) berarti berjuang untuk memastikan bahwa sebagian pendapatan perekonomian yang menguntungkan dimanfaatkan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada ekonomi global dan berkelanjutan (Tieto, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara deskriptif tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya menyediakan wadah bagi calon *entrepreneur* dan *start-up founder* sebagai perwujudan *government economic responsibility*?

Tanggung Jawab Pemerintah (*Government Responsibility*) kepada Warga Masyarakat

Anggapan lama yang paling sederhana tentang tanggung jawab pemerintah kepada warga masyarakatnya adalah sebagai pelindung: melindungi warga dari kekerasan. Thomas Hobbes *Leviathan* (Slaughter, 2017) menggambarkan bahwa dunia akan menjadi tanpa rasa apabila terdapat rasa tidak percaya dari warga masyarakat kepada pemerintah, atau sebaliknya, tanpa perhatian dari pemerintah dalam menyediakan keamanan hukum dan ketertiban, melindungi warga dari satu sama lain dan dari musuh asing. Kengerian dari minimnya atau tidak adanya perhatian pemerintah dalam menyediakan fungsi tersebut tampak secara global di banyak negara yang sedang bermasalah/berkonflik dan pada dasarnya didominasi oleh daerah yang tidak dikuasai. Ketika kekacauan perang dan kekacauan di bidang keamanan semakin meningkat, warga akan memilih pemerintah yang despotik dan fanatik, seperti Taliban dan ISIS, atas penghancuran kelompok-kelompok yang bertikai. Gagasan tentang pemerintah sebagai pelindung menuntut pajak untuk mendanai, melatih, dan melengkapi pasukan bersenjata (tentara) dan pasukan polisi; untuk membangun pengadilan dan penjara; dan untuk memilih atau menunjuk pejabat dalam menerapkan hukum, dalam hal ini warga negara tidak boleh terputus haknya untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Mengenai ancaman asing, pemerintah sebagai pelindung membutuhkan kemampuan lobi dan negosiasi dengan pemerintah lain sebelum melakukan genjatan senjata.

Government Economic Responsibility

Anggapan atau konsep baru yang lebih kompleks tentang pemerintah saat ini adalah pemerintah sebagai penyedia, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang individu tidak dapat menyediakan sendiri untuk diri mereka sendiri. Pemerintah dalam konsepsi ini adalah solusi untuk masalah aksi kolektif, dimana warga negara menciptakan barang publik yang menguntungkan semua orang.

1
Infrastruktur ekonomi dasar konektivitas manusia termasuk dalam kategori ini: sarana perjalanan fisik, seperti jalan, jembatan dan berbagai jenis pelabuhan, dan semakin meningkatnya sarana perjalanan *virtual*, seperti *broadband*. Semua infrastruktur ini ada, dan biasanya pada awalnya, disediakan oleh pengusaha swasta yang melihat peluang untuk membangun jalan, menetapkan, dan membebankan biaya kepada pengguna, tetapi modal yang diperlukan sangat besar dan manfaat publik sangat jelas sehingga pada akhirnya pemerintah yang mengambil alih.

1
Konsep pemerintah yang lebih luas sebagai penyedia adalah negara kesejahteraan sosial: pemerintah dapat melindungi ketidakmampuan warga negara untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri, terutama dalam kondisi rentan yang biasanya dialami oleh warga masyarakat dari kalangan muda, usia lanjut, sakit, cacat dan pengangguran karena kekuatan ekonomi di luar kendali mereka. 1
Ketika negara kesejahteraan telah berevolusi, para pengkritiknya telah melihatnya lebih sebagai pelindung dari hasil keras kapitalisme, atau mungkin sebagai sarana untuk melindungi orang kaya dari kemarahan politik orang-orang yang direbut. Namun, yang terbaik adalah menyediakan infrastruktur perawatan untuk memungkinkan warga bertumbuh secara sosial dan ekonomi dengan cara yang sama seperti infrastruktur persaingan. Ini memberikan jaminan sosial yang memungkinkan warga untuk menciptakan keamanan ekonomi mereka sendiri.

1
Masa depan pemerintah dibangun di atas dasar-dasar perlindungan dan penyediaan ini. Pemerintah akan terus melindungi warga dari kekerasan dan dari perubahan hidup yang terburuk. Pemerintah akan terus menyediakan barang publik, pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan ekonomi yang kompetitif secara global dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Namun sedapat mungkin, pemerintah harus berinvestasi dalam kemampuan warga negara untuk memungkinkan mereka menyediakan bagi diri mereka sendiri dalam keadaan yang serba cepat dan terus berubah setiap saat.

Tidak mengherankan, ketika visi pemerintah sebagai investor ini berasal dari budaya kewirausahaan yang mendalam. Reporter teknologi Gregory Ferenstein telah melakukan jajak pendapat untuk memimpin para pengusaha Silicon Valley di negara Amerika Serikat dan menyimpulkan bahwa mereka menginginkan pemerintah menjadi investor dalam aktivitas perekonomian masyarakat, daripada sebagai pelindung dari kapitalisme. Mereka ingin pemerintah mendanai pendidikan, mendorong kewarganegaraan yang lebih aktif, mengejar aliansi perdagangan internasional yang mengikat, dan membuka perbatasan bagi semua imigran.

1

Namun dalam praktiknya, pemerintah sebagai investor akan berarti lebih dari sekadar mendanai sekolah dan membuka perbatasan. Jika pemerintah berasumsi bahwa warga negara utama dapat menyelesaikan diri mereka sendiri secara lebih efisien dan efektif daripada yang dapat disediakan pemerintah bagi mereka, pemerintah harus berinvestasi tidak hanya dalam kultivasi kemampuan warga, tetapi juga dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur untuk memungkinkan warga negara untuk berhasil dalam skala besar.

Prioritas yang paling penting dari pemerintah sebagai investor adalah pendidikan, tetapi pendidikan memang mutlak hak warga negara sejak lahir hingga akhir hayatnya. Bahkan warga negara yang berpendidikan tinggi, bagaimanapun, tidak dapat hidup sesuai dengan potensi penuh mereka sebagai pemikir dan pembuat kreatif kecuali mereka memiliki sumber daya untuk diajak bekerja sama. Ahli futuris dan konsultan bisnis John Hagel III, John Seeley Brown dan Lang Davison berpendapat dalam *"The Power of Pull"*, bahwa perusahaan yang sukses tidak lagi merancang produk sesuai dengan spesifikasi abstrak dan mendorongnya kepada pelanggan, tetapi menyediakan *platform* dimana individu dapat menemukan apa yang mereka perlu dan terhubung dengan siapa yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Jika pemerintah benar-benar ingin berinvestasi dalam bakat warga negara, maka harus menyediakan 'produk' yang sama dalam bentuk *platform* sehingga warga dapat berbelanja secara cerdas dan efisien yang dimulai dari asuransi kesehatan sampai peluang pendidikan hingga izin usaha dan calon mitra bisnis. *Platform-platform* itu tidak bisa hanya menjadi sumber data besar tetapi harus dikuratori, dirancang dan terus diperbarui untuk pengalaman warga yang sukses.

Pemerintah yang percaya pada bakat dan potensi warga atau masyarakatnya akan mencurahkan sebagian besar pendapatan pajaknya untuk diinvestasikan bagi perekonomian warganya dalam rangka membantu warga masyarakat mencapai potensi dirinya dalam wujud visi yang menarik. Proses ini menghindari keterlambatan serta birokrasi dalam hal penyediaan layanan pemerintah secara langsung, meskipun setiap unit pemerintah saling bersaing. Pemerintah seperti ini menganggap bahwa warga negara lebih cepat dan lebih kreatif dalam menanggapi perubahan dan menghasilkan solusi baru. Sebelum pemerintah melakukan investasi sebagai wujud tanggung jawab bagi perkembangan perekonomiannya, harus jeli dalam mengidentifikasi dan menangani kebutuhan warga masyarakat yang berubah setiap saat dengan menyediakan media berkreasi agar membantu warga masyarakat mendapatkan sumber daya dan menciptakan koneksi sosial sebagai jaringan kerja sesuai kebutuhan yang diharapkan warga masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu melihat seluruh

rangkaian kebutuhan publik yang diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai tingkat sosial ekonomi (Slaughter, 2017).

METODOLOGI

Peneliti di dalam penelitian kualitatif mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan *review* semua hasil data tersebut, memahami, dan mengorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan sumber data (Creswell, 2009), sehingga penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang fasilitas/layanan, berbagai aktivitas yang tersedia di KORIDOR (*co-working space*) serta manfaatnya bagi warga kota Surabaya sebagai salah satu wujud *government economic responsibility* dari Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan relawan *start-up* dari warga masyarakat Surabaya (*informant*) dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dari Pemerintah Kota Surabaya (*key informant*) untuk mendapatkan gambaran dari fenomena yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlokasi di gedung Siola lantai 3, jalan Tunjungan, Genteng, kota Surabaya, KORIDOR *co-working space* memiliki beragam aktivitas yang mampu menarik para kawula muda kota Surabaya untuk belajar banyak hal. Mulai dari belajar teknik sablon kaos, belajar tentang produksi film dari sineas muda yang dihadirkan langsung dari Jakarta, hingga belajar tentang kewirausahaan dan bisnis *online* melalui media digital bersama pakar *entrepreneurship*. Seluruh warga masyarakat Surabaya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di KORIDOR sebagai ruang belajar bersama dilengkapi dengan jaringan *wi-fi* atau internet tidak berbayar.



Tata Rupa Prime (*Creative Thinking Community*)



Inkubasi 100 *Start Up Digital*

KORIDOR didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai wadah belajar dan bersosialisasi antar warga masyarakat kota Surabaya dari berbagai latar belakang kebudayaan, sehingga mewujudkan pula unsur kebhinnekaan dalam program pendidikan non formal yang

bisa dilakukan kapan saja dengan peserta diskusinya siapa saja. Komunitas berpikir kreatif dari berbagai wilayah di kota Surabaya pun memanfaatkan KORIDOR sebagai ruang diskusi bersama yang dapat dilakukan berkala dengan materi yang berbeda-beda.

“Seluruh pemangku kepentingan dalam suatu daerah selayaknya turut berperan dan bertanggung jawab dalam pembangunan perekonomian daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pelaku usaha, para profesional, konsumen, para pekerja dan masyarakat madani pada umumnya. Tampaknya atas pertimbangan tersebutlah, Bu Risma sebagai walikota Surabaya menggagas didirikannya KORIDOR ini” (M. Vikser, Kabag Humas Pemkot Surabaya)

Pemerintah idealnya memberikan manfaat bagi warga masyarakatnya sehingga diharapkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* selain memberdayakan warga masyarakat setempat juga sebagai upaya agar pelaksanaan program perekonomian yang dicanangkan pemerintah sesuai target. *Corporate Social Responsibility* diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara pemerintah dan warga masyarakat setempat dalam mencapai kesejahteraan untuk mengatasi permasalahan ekonomi melalui tanggung jawab ekonomi pemerintah sebagai kepanjangan tangan. Sedangkan, *Government Economic Responsibility* merupakan komitmen pemerintah untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan dengan memperhatikan sisi kewirausahaan (*entrepreneurship*) sebagai peran serta warga masyarakat dalam mendukung pemerintah mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Adanya tanggung jawab sosial pemerintah tersebut tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan. Citra pemerintah akan terjaga dengan baik sehingga terkesan pemerintahan yang peduli terhadap kemakmuran warga masyarakatnya. Kegiatan pemerintah dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif bagi warga masyarakat. Selain membantu perekonomian warga masyarakat, pemerintah juga akan dianggap bersama warga masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya pemerintah akan memperoleh tanggapan (*feedback*) yang positif dari warga masyarakat setiap kali membuat kebijakan baru. Pemerintah tidak saja dianggap sekedar membuat kebijakan untuk dipatuhi warga masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan bagi warga masyarakat. Secara tidak langsung maka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut meningkatkan loyalitas karena warga masyarakat cenderung melihat dari citra yang sudah dibentuk dari tanggung jawab ekonomi yang diberikan pemerintah.

Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan pemerintah akan lebih erat. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan pada

kedua pihak. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab ekonomi pemerintah (*government economic responsibility*) pemerintah kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk adanya beasiswa terhadap anak tidak mampu (Gerakan Orang Tua Asuh), pembangunan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat, salah satunya yaitu didirikannya KORIDOR sebagai ruang kerja bersama (*co-working space*) bagi warga kota Surabaya untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan karya nyata bagi pembangunan kota.

Keberadaan KORIDOR adalah sebagai wujud peran pemerintah kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dalam membangun serta bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan perekonomian kota Surabaya. Diharapkan dengan adanya KORIDOR sebagai ruang diskusi bersama mampu melahirkan wirausaha dan kreator berbakat baru di bidangnya masing-masing, mulai dari bidang seni, kerajinan, *fashion*, *entertainment*, *broadcasting*, dan *digital business*.

{ SHAPE * MERGEFORMAT }

Diskusi tentang Produksi Audio Visual dengan sutradara film “Ada Apa dengan Cinta?”

“Saya sangat beruntung bisa bertemu langsung dengan sutradara muda dan berbakat yang menyutradarai film “Ada Apa dengan Cinta” dan belajar banyak disini secara gratis” (Antonius Yikwa, salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya yang berasal dari Papua)

Pemerintah kota Surabaya menginvestasikan keuntungan dari aktivitas perekonomiannya untuk membangun sarana-prasarana yang dapat dipergunakan dan memberi nilai tambah secara sosial-ekonomi. KORIDOR memiliki fasilitas dengan akses gedung dan internet 24 jam, *co-working space* untuk umum (luas: 177 m², kapasitas: 70 orang), ruang event format teater (luas: 128,8 m², kapasitas: 100 orang), ruang *event* format *classroom* (luas 128,8m², kapasitas: 60 orang). Setiap ruangan dilengkapi dengan *backdrop*, *sound system*, *screen*, dan *projector*. Pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa mitra, diantaranya adalah: Kreavi, Indonesia Android Kejar, dan Gapura Digital sebagai upaya memberikan stimuli kepada warga masyarakat Surabaya agar lebih produktif, inovatif dan berdaya guna sehingga mampu menghasilkan karya nyata di bidang wirausaha mandiri dengan membawa nama baik kota Surabaya.

“Jika kita tahu bahwa warga masyarakat kita membutuhkan asupan Ikan untuk makan, maka kita jangan beri mereka Ikannya, tetapi lebih baik membekali mereka pengetahuan tentang bagaimana mereka mampu mendapatkan Ikan sehingga nantinya mampu mempertahankan

hidupnya tidak hanya hari ini saja, tetapi juga beberapa hari ke depan bahkan dapat mewariskan ilmu menangkap Ikan tersebut kepada anak cucu mereka. Sama halnya dengan KORIDOR yang kami (pemerintah kota Surabaya) dirikan untuk warga masyarakat Surabaya adalah sebagai fasilitas warga masyarakat untuk menambah wawasan, mengembangkan bahkan berbagi kepada sesamanya tentang entrepreneurship dan berpikir kreatif agar mereka semakin maju, bahkan sekaligus pula berperanserta membangun ekonomi kreatif bersama pemerintah” (M. Vikser, Kabag Humas Pemkot Surabaya)

Hal ini erat pula kaitannya dengan motivasi pemerintah kota Surabaya kepada warga masyarakat dalam menggiatkan ekonomi kreatif. Salah satu upaya pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan warga masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, inovasi, serta penciptaan ekosistem yang kondusif dan efektif dalam mendorong industri kreatif untuk terus lahir dan bertumbuh, antara lain melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berdiskusi dan bekerja bersama dalam satu ruang yang kondusif layaknya KORIDOR.

Ekonomi kreatif yang mengacu pada kreativitas sumberdaya manusia, berpeluang mendorong daya saing bangsa di masa depan. Apabila warga masyarakat suatu daerah memiliki kemampuan untuk berkreasi dalam menciptakan inovasi dan nilai tambah, maka kreativitas tersebut akan menjadi sumberdaya terbarukan yang memiliki nilai tinggi dan tak lekang oleh waktu. Kreativitas mampu mendorong dihasilkannya produk-produk manufaktur dan jasa yang inovatif serta bernilai tambah tinggi sehingga kelak bangsa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada produk ekspor, melainkan mampu mengeksport produk yang berdaya saing tinggi. Kreativitas dan inovasi juga akan menjadikan warisan budaya dan kearifan lokal berkontribusi besar tidak hanya bagi perekonomian nasional namun juga bagi peningkatan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

SIMPULAN

Pemerintah kota Surabaya percaya pada bakat dan potensi warga masyarakatnya dengan mencurahkan sebagian besar pendapatan pajaknya untuk diinvestasikan bagi pertumbuhan perekonomian warga masyarakatnya dalam rangka mencapai potensi dirinya dalam wujud tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*). Wujud tanggung jawab ekonomi pemerintah kota Surabaya berupa pembangunan fasilitas umum yang berguna bagi warga masyarakat, salah satunya yaitu didirikannya KORIDOR sebagai ruang kerja bersama (*co-working space*) bagi warga kota Surabaya untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan karya nyata bagi pembangunan. Selain itu, citra pemerintah akan terjaga dengan baik sehingga kegiatan pemerintah dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif bagi

warga masyarakat dengan harapan pemerintah akan memperoleh tanggapan (*feedback*) yang positif dari warga masyarakat setiap kali membuat kebijakan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Slaughter, Anne Marie. 2017. 3 Responsibilities Every Government has Towards its Citizens. America: World Economic Forum of New America. Dikutip dari: <https://www.weforum.org/agenda/2017/02/government-responsibility-to-citizens-anne-marie-slaughter/>, pada: 27 Juni 2018.

Tieto. 2018. Sustainability (Economic Responsibility). Dikutip dari: <https://www.tieto.com/sustainability/economic-responsibility>, pada: 27 Juni 2018.

Universitas Al Azhar. 2018. Peluang *Co-working Space* di Indonesia pada 2018 masih Terbuka Lebar. Dikutip dari: <http://entrepreneur.uai.ac.id/peluang-co-working-space-di-indonesia-pada-2018-masih-terbuka-lebar/>, pada 27 Juni 2018.

Wardani, Dewasari M. 2017. Surabaya Kembangkan Kota Pusat *Start-Up Digital*. Dikutip dari: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/surabaya-kembangkan-kota-pusat-startup-digital>, pada: 27 Juni 2018.

Yudarwati, G. Arum. 2004. *Community Relations: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Organisasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya..

KORIDOR Co-Working Space sebagai Perwujudan Government Economic Responsibility Pemerintah Kota Surabaya

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

guruppkn.com

Internet Source

10%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10%

Exclude bibliography Off